



# Bupati Sampaikan

## Pertanggungjawaban APBD 2018

SEKDA Ketapang, Farhan mewakili Bupati Ketapang menyampaikan Pidato Bupati Ketapang dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang Tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang pada Senin (24/6). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi, tersebut dihadiri anggota DPRD Ketapang; Unsur Forkopimda, Asisten I Sekda, Staf Ahli Bupati dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam pidatonya, Bupati mengatakan bahwa penyampaian

raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang 2018 adalah merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pihak eksekutif untuk disampaikan kepada DPRD. Ini juga merupakan tanggung jawab moral eksekutif selaku pemegang mandat pelaksanaan program atau kegiatan tahun anggaran 2018.

"Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan hasilnya telah disampaikan pada tanggal 28 Mei 2019 dengan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian," kata Sekda Keta-

pang, Farhan, mewakili Bupati Ketapang, Martin Rantan.

Pemerintah Daerah Ketapang telah meraih opini WTP lima kali berturut-turut mulai tahun anggaran 2015 sampai 2018. Hal ini berarti secara umum Pemerintah Daerah Ketapang telah berupaya maksimal menyajikan informasi yang wajar dalam setiap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan kecukupan pengungkapan dalam semua hal yang material, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern. Kondisi ini juga sekaligus menunjukkan adanya kerjasama yang baik dan harmonis antara

legeslatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan Pemkab Ketapang.

Pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,16 triliun atau 100,30 persen dari target pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD Ketapang tahun 2018 sebesar Rp190 miliar atau sebesar 113,67 persen dari target yang ditetapkan. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi dana perimbangan Ketapang tahun 2018 sebesar Rp1,57 triliun atau sebesar 99,85 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah Ketapang tahun 2018 sebesar Rp402 miliar atau 96,66 persen dari target yang ditetapkan. Adapun lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, bagi hasil pajak provinsi dan pendapatan bagi hasil lainnya.

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,11 triliun atau sebesar 95,84 persen

dari rencana belanja yang ditetapkan. Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2018, terdiri dari belanja tidak langsung Rp1 triliun atau sebesar 97,71 persen dari rencana belanja ditetapkan. Kemudian belanja langsung Rp1,11 triliun atau sebesar 94,21 persen dari rencana belanja yang ditetapkan.

Penerimaan pembiayaan daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp53,4 miliar. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar. Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan sebagaimana telah disampaikan, maka sisa lebih perhitungan APBD Ketapang 2018 sebesar Rp98,5 miliar. (\*)



**PERTANGGUNGJAWABAN:** Sekda Ketapang, Farhan menyerahkan pidato Bupati terkait Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2018, kepada Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi.



**SAMPAIKAN:** Sekda Ketapang, Farhan membacakan pidato Bupati terkait Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2018 pada sidang paripurna.



**PIMPINAN OPD:** Sidang paripurna juga diikuti oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Ketapang.



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan  
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



**PIMPIN SIDANG:** Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi memimpin sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati terkait Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2018.



**ANGGOTA DEWAN:** Sejumlah anggota DPRD Ketapang mengikuti sidang peripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati terkait Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun 2018.